

MASYARAKAT TIONGHOA DI MAKASSAR DALAM PUSARAN KONFLIK ETNIS 1965-1997

Suardi Kaco, Musafir Pababari
Universitas Al Asyariah Mandar,
UIN Alauddin Makassar
kamarallingsuardi@yahoo.com
musafir.pababari@uin-
alauddin.ac.id

Abstract

This article aims to reveal how and why the Tionghoa community in Makassar experienced prolonged ethnic conflict. The method used in this study is the method of writing history with a historical and sociological approach. In the results of the study it was found that the Tionghoa community in Makassar had been present since the 13th century. However, they were involved in the vortex of ethnic conflict since 1965-1997. This conflict resulted in inter-ethnic tensions and socio-economic losses for the Tionghoa community. Nonetheless, they continue to struggle to survive and contribute to the development of the City of Makassar. Their existence inspires the importance of tolerance and harmony in a multicultural society.

Keyword: Tionghoa Community, Ethnic Conflict

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana dan mengapa masyarakat Tionghoa di Makassar mengalami konflik etnis berkepanjangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan sejarah dengan pendekatan sejarah dan sosiologi. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Tionghoa di Makassar telah hadir sejak abad 13. Namun, mereka terlibat dalam pusaran konflik etnis sejak tahun 1965-1997. Konflik ini mengakibatkan ketegangan antar-etnis dan kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat Tionghoa. Meskipun demikian, mereka terus berjuang untuk bertahan dan berkontribusi dalam pembangunan kota Makassar. Keberadaan mereka mengilhami pentingnya toleransi dan kerukunan dalam masyarakat multikultural.

Kata kunci: Masyarakat Tionghoa, Konflik Etnis

A. Pendahuluan

Masyarakat Tionghoa di Makassar mengalami periode yang penuh tantangan dan ketegangan antara tahun 1965 hingga 1997. Selama periode ini, etnis Tionghoa di kota tersebut menghadapi diskriminasi yang berkelanjutan dan sering kali menjadi sasaran

kekerasan massa. Insiden-insiden yang terjadi pada tahun 1965, 1980, dan 1997 mencerminkan berbagai aspek konflik yang melibatkan masyarakat Tionghoa dan masyarakat mayoritas di Makassar.

Pada tahun 1965, Indonesia dilanda peristiwa politik yang mengguncang, terutama pembunuhan sejumlah tokoh militer dan politik dalam peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S). Kelompok-kelompok politik dan militer yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dianggap bertanggung jawab atas peristiwa ini. Di tengah suasana politik yang kacau, masyarakat Tionghoa secara luas dituduh terlibat dalam G30S, meskipun tuduhan ini tidak didasarkan pada bukti yang jelas. Tuduhan ini menyebabkan maraknya serangan dan amukan massa terhadap masyarakat Tionghoa di berbagai wilayah termasuk Makassar.

Amuk massa terhadap masyarakat Tionghoa di Makassar pada tahun 1965 dipicu oleh ketakutan dan ketidakpastian yang melanda masyarakat pada saat itu. Masyarakat mayoritas percaya bahwa Tionghoa memiliki afiliasi atau simpati terhadap PKI, dan sebagai akibatnya, mereka menjadi sasaran kemarahan dan kekerasan. Toko-toko dan rumah-rumah milik masyarakat Tionghoa dirampok, dirusak, dan dibakar. Banyak korban tewas dan terluka dalam serangan ini. Beberapa anggota masyarakat Tionghoa bahkan dipaksa untuk meninggalkan kota dan kehilangan sumber penghidupan mereka.

Meskipun situasi politik dan sosial di Indonesia mengalami perubahan setelah peristiwa 1965, masyarakat Tionghoa di Makassar tetap menghadapi diskriminasi dan kekerasan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1980, terjadi serangkaian amukan massa di Makassar yang dipicu oleh permasalahan sepele seperti sengketa tanah atau masalah pribadi. Masyarakat Tionghoa menjadi sasaran serangan yang tidak adil dalam insiden-insiden ini, dengan toko-toko mereka dirusak dan dirampok.

Amuk massa terhadap etnis Tionghoa di Makassar juga terulang pada tahun 1997. Pada periode ini, ketegangan antara masyarakat Tionghoa dan mayoritas lokal semakin memuncak. Insiden pembunuhan seorang anak perempuan bernama Ani Mujahidah Rasunah (9) oleh Benny Karre (23) seorang warga etnis Tionghoa yang mengidap kelainan jiwa memicu amukan massa yang melibatkan masyarakat Tionghoa sebagai target utama. Toko-toko, rumah-rumah, dan properti milik masyarakat Tionghoa sekali lagi menjadi sasaran serangan dan pembakaran.¹

¹ Muslim A.R. Effendy, "Tionghoa-Makassar di Tengah Pusaran Sejarah", dalam Heather Sutherland, dkk, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, (Cet. I; Yogyakarta: Ombak, 2004), h. 210.

B. Tinjauan Teoritis

Konflik pada umumnya dibagi menjadi dua jenis konflik, yakni konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal merupakan konflik antara elite dan rakyat. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di kalangan masyarakat sendiri.²

Konflik horizontal terbagi menjadi dua bagian, yaitu: *pertama*, konflik antaragama. Misal, konflik antarkelompok agama Islam dan kelompok agama Kristen di Poso tahun 1998-2001. *Kedua*, konflik antaretnis. contoh, konflik antara etnis Madura etnis Melayu di Kalimantan Barat (Pontianak dan Sambas) tahun 1999.³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konflik etnis adalah bentuk konflik sosial yang terjadi antara dua atau lebih kelompok etnis yang berbeda, yang muncul akibat perbedaan identitas etnis, budaya, bahasa, agama, atau faktor-faktor lainnya. Konflik etnis seringkali melibatkan persaingan, ketegangan, atau bahkan kekerasan antara kelompok-kelompok etnis yang berbeda.

Menurut Donald L. Horowitz, Konflik etnis adalah konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok etnis yang berbeda, di mana kelompok-kelompok tersebut memiliki identitas etnis yang kuat dan saling bertentangan. Bagi Horowitz, konflik etnis umumnya terjadi di sebuah negara karena adanya ketidakadilan distribusi ekonomi dan akses pendidikan.⁴

Menurut Selo Sumardjan dalam Prayudi, konflik etnis terjadi: *pertama*, ada dua suku (etnis) berdampingan. *Kedua*, dalam hubungan sosial terjadi interaksi. *Ketiga*, dalam interaksi itu dirasakan oleh salah satu atau kedua pihak bahwa ada unsur-unsur budaya yang bertentangan, ada ketimpangan sosial, dan atau terdapat sumber kehidupan yang menjadi bahan perebutan.⁵

C. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian sejarah dengan berdasarkan pada empat tahap, yaitu: heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitik atau sejarah kritis-analitis. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dialektika sejarah Hegel (tesis-antitesis-sintesis) dan teori konflik.

² Novri Susan, *Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis*, (Cet. IV; Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 75-76.

³ Novri Susan, *Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis*, h. 76.

⁴ Donald L. Horowitz, *Ethnic Groups in Conflict*. (California: University of California Press, 1985), h. 52.

⁵ Prayudi, "Akar Masalah Penyebab Konflik Etnis dan Alternatif Penyelesaiannya", *Jurnal Ketahanan Nasional* IX, no. 3 (2004): h. 44-45

D. Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Awal Mula Tionghoa di Makassar

Orang-orang Tionghoa (Cina) sudah ada di Sulawesi (Makassar) sejak abad 13-14 M. Mereka yang datang pada periode ini adalah para pedagang yang tinggal sementara di wilayah pesisir pantai.⁶ Kedatangan orang-orang Tionghoa ini dikuatkan dengan temuan arkeologis, seperti benda-benda keramik yang tariknya jelas ditemukan diberbagai wilayah di Sulawesi, yang diduga kuat umumnya berasal dari Cina dari periode Dinasti Tang (abad ke-9 M) hingga periode Dinasti Sung (abad ke-11-13 M).⁷ Temuan arkeologis lain seperti inskripsi pada dua makam Cina bertarikh 1446 dan 1458 yang berada di sebuah kompleks pemakaman Cina tertua, yang sekarang telah dijadikan Pasar Sentral Makassar.⁸

Tahun 1660-an orang-orang Tionghoa sudah dinyatakan resmi menetap di Makassar dengan membangun pemukiman yang dikenal *Vlaardingen* atau *Chinessestraat* (kemudian berubah menjadi Tempelstraat dan kemudian jalan Sulawesi) yang terletak di bagian utara kantor pusat VOC di Benteng Rotterdam. Pada tahun 1730 tercatat jumlah orang Tionghoa di Makassar sebanyak 310 jiwa.⁹ Setelah itu, gelombang imigrasi orang-orang Tionghoa ke Makassar terus bertambah menjelang akhir abad ke-19 M hingga awal abad ke-20 M.¹⁰ Tercatat jumlah orang-orang Tionghoa di Makassar tahun 1930 sebanyak lebih dari 15.000 jiwa.¹¹

Menurut Muslimin A.R. Effendy, kedatangan orang-orang Tionghoa di Makassar disebabkan oleh berbagai faktor. *Pertama*, laju pertumbuhan penduduk Cina yang relatif tinggi tidak berbanding lurus dengan sumber-sumber ekonomi negeri Cina. *Kedua*, timbulnya kekacauan dalam negeri. *Ketiga*, jarak antara negeri Cina dengan daerah yang didatangi relative berdekatan. *Keempat*, situasi keamanan yang kondusif. *Kelima*, jaringan perdagangan Nusantara berkembang pesat.¹²

⁶ Muhammad Rais, "Merengkuh Umat Khonghucu di Aras Lokal: Potret Pelayanan Kementerian Agama terhadap Penganut Agama Khonghucu di Kota Makassar" dalam Shadiq Kawu, dkk, *Spirit Khonghucu: Modal Sosial dalam Merenda Kebangsaan*, (Cet. I; Jakarta Selatan: Orbit Publishing, 2011), h. 64.

⁷ Christian Pelras, *The Bugis*, Terj. Abdul Rahman Abu, dkk, *Manusia Bugis*, (Cet. I; Jakarta: Nalar bekerjasama Forum Jakarta-Paris, 2006), h. 32.

⁸ Muslim A.R. Effendy, "Tionghoa-Makassar di Tengah Pusaran Sejarah", dalam Heather Sutherland, dkk, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, h. 215.

⁹ Heatherd Sutherland, "Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Makassar: Perdagangan dan Kota di Abad ke-18" dalam Heather Sutherland, dkk, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, (Cet. I; Yogyakarta: Ombak, 2004), h. 27, 28. Lihat juga, Heri Kusuma Tarupay, "Boycot Jepang: Nasionalisme Cina Perantauan di Makassar 1915-1937" *Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences* 12, no. 1 (2017): h. 4.

¹⁰ Muslim A.R. Effendy, "Tionghoa-Makassar di Tengah Pusaran Sejarah", dalam Heather Sutherland, dkk, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, h. 216.

¹¹ Dias Pradadimara, "Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah Makassar" dalam Freek Colombijn, dkk, *Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*, Cet. I; Yogyakarta: Ombak, 2005), h. 256.

¹² Muslim A.R. Effendy, "Tionghoa-Makassar di Tengah Pusaran Sejarah", dalam Heather Sutherland, dkk, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, (Cet. I; Yogyakarta: Ombak, 2004), h. 215.

A.J. van Schinne dalam Heather Sutherland, mencatat bahwa keberadaan orang-orang Tionghoa di Makassar diduga banyak memengaruhi kebudayaan melaut orang-orang Bugis dan Makassar. Di mana orang-orang Bugis-Makassar dikenal jenius dalam melaut sementara orang-orang Cina (Tionghoa) dikenal piawai dalam berdagang dan cari untung. Dua karakteristik inilah yang menyatu padu dalam diri orang-orang Bugis-Makassar saat ini.¹³ Artinya bahwa akulturasi dan asimiliasi terjadi antara dua kebudayaan tersebut.

Dalam aspek kata sapaan juga mengalami akulturasi dan asimilasi. Istilah *toke*, *nona*, dan *baba* mulai muncul sejak orang-orang Cina (Tionghoa) menetap di Makassar. Misalnya, sebutan *toke* menunjuk pada cina asli (cina totok) yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki banyak uang (pemodal). *Toke* inilah dikenal banyak membantu memodali orang-orang Makassar menjadi pedagang. Namun, dalam perkembangannya sapaan *toke* digantikan dengan sapaan *baba*. Kemudian muncul kata sapaan, seperti *Baba Galesong*; *Baba Roso*; *Baba Sangkala*; *Baba Sento (Sin Tou)*. Begitu pula dengan kata sapaan *nona*. Sebutan *nona* menunjuk pada cina asli berjenis kelamin perempuan. Karena kaki cina perempuan kecil-kecil sehingga muncul istilah *nona cakdi bangkeng* (nona kecil kaki).¹⁴

Akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 bangunan-bangunan megah dan khas di kota Makassar identik dengan orang-orang Tionghoa. Misalnya, di Jalan Bacan terdapat sebuah rumah mewah milik seorang tokoh Tionghoa berpengaruh, Mayor Teong. Di sebelah Jalan Timor terdapat bangunan bergaya neo-Eropa, bekas Holland Chinese School dibangun pada 1907 oleh Gubernur Jenderal van Heutz. Di Jalan Sumba terdapat bangunan bekas sekolah Tionghoa di bangun 1930 oleh perkumpulan "Loen Djie Tong". Tidak jauh dari ujung Jalan Lembeh terdapat gedung kesenian milik perkumpulan "Hok Tjoe Koen Hwe Koan" (pernah difungsikan sebagai "Bioskop Ratu") dibangun 1914 oleh Tju Jin Hwee.¹⁵ Masih banyak bangunan mewah milik orang-orang Tionghoa di Kota Makassar yang tidak sempat disebutkan di sini.

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi orang-orang Tionghoa terhadap kemajuan kota, ekonomi, sosial, dan kebudayaan Makassar cukup besar. Namun ironis, sikap dan tindakan diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa juga kerap terjadi, baik dilakukan oleh negara (pemerintah) maupun masyarakat itu sendiri. Bahkan tak jarang warga Tionghoa menjadi sasaran amukan massa. Di Kota Makassar, setidaknya tercatat ada tiga peristiwa

¹³ Heather Sutherland, "Teripang dan Perahu Wangkang: Perdagangan Makassar dengan Cina pada Abad ke-18, dalam Roger Tol ed., *Authority and Enterprise among the Peoples of South Sulawesi*, Terj. Tim Penerjemah Ininnawa, *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*, (Cet. I; Makassar: Ininnawa kerjasama KITLV-Jakarta, 2009), h. 99.

¹⁴ Tadjuddin Maknun, "Asimilasi Sistem Sapaan Multikultural Cina, Melayu, dan Makassar" disampaikan pada Seminar Bersama Universitas Hasanuddin dan Universitas Kebangsaan Malaysia di Makassar 2011, h. 8.

¹⁵ Muslim A.R. Effendy, "Tionghoa-Makassar di Tengah Pusaran Sejarah", dalam Heather Sutherland, dkk, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, h. 220-221.

konflik yang dialami oleh orang-orang Tionghoa, yakni di mulai dari masa transisi Orde Lama ke Orde Baru hingga menjelang masa kekuasaan Orde Baru.

2. Masyarakat Tionghoa dalam Pusaran Konflik Etnis 1965-1997

a. Pengganyangan PKI 1965

Pengganyangan PKI 1965 adalah peristiwa tindakan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Angkatan Darat beserta dengan organisasi-organisasi masyarakat terhadap orang-orang yang dituduh komunis. Gerakan ini dimulai pada Oktober 1965 oleh AD dengan kampanye anti komunis besar-besaran. Langkah politik AD untuk menekan PKI merebak sampai ke daerah-daerah. Di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar gerakan anti komunis berkembang sangat cepat. Demontrasi anti PKI dari berbagai organisasi masyarakat dan mahasiswa terus belangsung. Aksi massa tersebut mulai tidak terkontrol hingga berkembang menjadi anarkis dan menimbulkan korban jiwa. Mereka melakukan perusakan rumah, perabot rumah para anggota PKI dan ormas-ormasnya.¹⁶

Tanggal 10 Oktober 1965, aksi kemarahan massa berlanjut, namun sasarannya tidak lagi hanya orang-orang PKI, tetapi juga orang-orang Tionghoa. Pembakaran dan penjarahan tidak hanya menimpa gedung dan tanah milik orang-orang PKI, tetapi juga rumah dan toko milik warga Tionghoa. Tindakan rasialis warga Bugis-Makassar terhadap orang-orang Tionghoa sebagai bentuk pelampiasan kemarahan terhadap peristiwa G30S dan poros Jakarta-Beijing yang dibangun oleh Pemerintah Orde Lama. Pengganyangan orang-orang Tionghoa dalam kasus ini menunjukkan bahwa isunya bukan lagi persoalan ideologi dan agama, tetapi mengarah pada masalah etnis. Selain itu, juga ada asumsi yang berkembang bahwa orang-orang Tionghoa adalah anggota PKI yang wajib ditumpas.¹⁷

Orang-orang Tionghoa dituduh terlibat dalam gerakan G30S. Mereka (etnis Tionghoa) dan PKI diklaim berkerjasama dengan komunis Tiongkok dalam melakukan pemberontakan terhadap negara. Dugaan keterlibatan Tiongkok dalam G30S membuat publik berpikir bahwa dalang dari penculikan dan pembunuhan para jenderal adalah orang-orang Tionghoa.¹⁸ Dari sinilah lahir sejumlah kebijakan Orde Baru mengenai etnis Tionghoa di Indonesia.

Tahun 1966, pemerintah Orde Baru mulai memikirkan tentang kebijakan khusus terhadap etnis Tionghoa dan menggantikan sebutan "Tionghoa" menjadi "Cina". Upaya ini diduga atas pengalaman historis pada zaman Belanda bertujuan untuk merendahkan, menghina dan meremehkan etnis Tionghoa. Usulan mengenai kebijakan etnis Tionghoa

¹⁶ Taufik, *Kamp Pengasingan Moncongloe*, (Cet. I; Depok: Desantara, 2009), h. 111

¹⁷ Taufik, *Kamp Pengasingan Moncongloe*, h. 112. Lihat juga, Christiany Juditha, "Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar" *Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 1 (2015): h. 93.

¹⁸ Koran Sulindo, "Peristiwa G30S 1965 dan Isu Rasial Tionghoa" <https://koransulindo.com/peristiwa-g30s-1965-dan-isu-rasial-tionghoa> diakses Selasa 16 Mei 2023.

muncul dari pihak TNI-AD dan disampaikan kepada presiden agar diberlakukan kebijakan khusus kepada etnis Tionghoa untuk menghindari sikap superior etnis Tionghoa.¹⁹

Tahun 1967 keluarlah dua kebijakan Orde Baru mengenai etnis Tionghoa, yakni, *pertama*, Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 tentang Masalah Cina. *Kedua*, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Kebijakan pertama lahir dan ditandatangani 28 Juni 1967, sementara kebijakan kedua lahir dan ditandatangani 6 Desember 1967.²⁰ Menyusul sejumlah kebijakan setelah itu, seperti Instruksi Menteri Dalam Negara Nomor 455.2-360 tahun 1968 tentang Penataan Klenteng-klenteng di Indonesia. Tahun 1988 keluar lagi kebijakan mengenai etnis Tionghoa, seperti Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Nomor 02/SE/Ditjen/PP6/K/1988 tentang Larangan Penerbitan dan Percetakan Tulisan/Iklan Beraksen dan Berbahasa Cina. Terakhir, tahun 1996 keluar Keputusan Presiden Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1996 tentang Masalah Ganti Nama.²¹

Kebijakan-kebijakan Orde Baru mengenai etnis Tionghoa dinilai sangat diskriminatif. Kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi etnis Tionghoa terus dikontrol. Apalagi dalam aspek politik, mereka terus diawasi agar tidak terlibat dalam politik. Sekolah Tionghoa dilarang, mereka dipaksa untuk mengikuti pendidikan Indonesia. Bahasa Tionghoa dilarang dipakai termasuk penamaan Tionghoa untuk toko atau perusahaan. Seni pertunjukan etnis Tionghoa, seperti Barongsai dilarang dipertunjukan diruang publik, termasuk larangan perayaan hari raya Imlek.²²

b. Konflik Etnis 1980

Pasca pengganyangan PKI 1965, etnis Tionghoa di Makassar terus dibayang-bayangi konflik etnis. Kebijakan diskriminatif dari pemerintah Orde Baru mengenai etnis Tionghoa seakan menjadi “bom waktu” yang kapan saja bisa meledak. Sementara itu, sikap rasialis orang Bugis-Makassar yang terkonstruksi dari sejak kasus 1965 juga masih terus terpatri dalam diri orang-orang Bugis-Makassar. Faktor-faktor inilah yang bisa menyebabkan konflik etnis sangat rentan terus muncul dalam relasi sosial etnis Tionghoa dengan etnis Bugis-Makassar.

Konflik etnis pada 1965 adalah dipicu oleh konflik politik dan ideologi. Berbeda dengan konflik yang terjadi pada tahun 1970-an dan puncaknya tahun 1980. Di tahun ini konflik etnis meledak karena dipicu oleh konflik personal, yang kebetulan pelakunya berasal

¹⁹ Muslim A.R. Effendy, “Tionghoa-Makassar di Tengah Pusaran Sejarah”, dalam Heather Sutherland, dkk, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, h. 214.

²⁰ Surat Edaran Preskab Ampera No. SE-06/Pres.Kab/6/1967 tentang Masalah Cina. Lihat juga, Inpres RI No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

²¹ Kinanthi Nisful Laily, “Dinamika Kehidupan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar pada Masa Orde Baru 1966-1998”, *Skripsi* (Jember: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2016), h. 40,41.

²² Kinanthi Nisful Laily, “Dinamika Kehidupan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar pada Masa Orde Baru 1966-1998”, h. 38.

dari etnis Tionghoa dan etnis Bugis-Makassar. Misalnya, seperti diungkapkan oleh Cristiany Juditha²³ konflik etnis antara etnis Tionghoa dan Bugis-Makassar tahun 1978 disebabkan oleh suatu hal yang sepele, yakni dalam hal jual-beli. Hanya saja, salah satu pihak merasa tidak puas sehingga melakukan provokasi.

Konflik kembali terjadi tahun 1980, dan ini merupakan konflik terparah. Konflik ini bermula dari peristiwa pembunuhan seorang pekerja rumah tangga yang bekerja di sebuah toko milik etnis Tionghoa. Karena nama tokonya adalah "Toko La" sehingga disebut peristiwa "Toko La". Peristiwa ini menyebabkan terjadinya kerusuhan dan pengganggangan etnis Tionghoa di Makassar.²⁴ Kronologi peristiwa ini, di mana seorang warga Tionghoa, pemilik Toko La di Jalan Sungai Calendu, menghamili pembantunya, asal etnis Toraja. Namun, nahas si pembantu tersebut dibunuh oleh majikannya ketika diminta untuk dinikahi. Berita kematian si pembantu itu kemudian tersebar luas di masyarakat dan menimbulkan tindakan reaktif dari masyarakat sehingga terjadi pemukulan terhadap orang-orang Tionghoa di mana-mana.²⁵

Selain kekerasan fisik, akibat dari konflik etnis tersebut tercatat 1.471 rumah dan toko milik orang-orang Tionghoa yang dirusak dan dibakar, serta 80 mobil dan 168 sepeda motor ludes dibakar oleh orang-orang pribumi. Walikota Madya Ujung Pandang, Malik B. Masry, saat itu menaksir jumlah kerugian mencapai 17,5 Miliar Rupiah.²⁶

Dalam rangka meredam konflik dan merelokalisasi tingkat kekerasan yang terjadi, Pemerintah Kota Madya Ujung Pandang memberlakukan "jam malam" bagi aparat kepolisian dan militer untuk mencegah timbulnya kembali konflik tersebut. Kebijakan pemberlakuan jam malam itu berjalan hingga kehidupan sosial Kota Makassar dianggap aman.²⁷

c. Konflik Etnis 1997

Berselang beberapa tahun kemudian, tepatnya September 1997, kota Makassar kembali mencekam. Di mana-mana kerusuhan terjadi akibat amukan massa tersulut amarah. Tragedi ini disebut "Makassar Membara". Peristiwa tersebut menyebabkan lima orang meninggal dunia, 13 mahasiswa mengalami luka tembak, dan 116 orang ditahan. Selain itu, terdapat 80 mobil dan 168 sepeda motor rusak dan terbakar, serta 1.471 jumlah bangunan dan tokoh rusak milik warga etnis Tionghoa. Tragedi tersebut dipicu oleh terbunuhnya seorang anak perempuan bernama Ani Mujahidah Rasunah (9 tahun) yang masih duduk

²³ Cristiany Juditha, "Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar", *Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 1 (2015): h. 92.

²⁴ Cristiany Juditha, "Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar", *Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 1 (2015): h. 93.

²⁵ Kinanthi Nisful Laily, "Dinamika Kehidupan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar pada Masa Orde Baru 1966-1998", h. 35.

²⁶ www.oocities.org, "Bila Sara Kebakaran Jenggot, Jago Merah pun Merenggut Makassar" <http://www.oocities.org/apii-berlin/ujung.html> diakses 17 Mei 2023.

²⁷ Muslim A.R. Effendy, "Tionghoa-Makassar di Tengah Pusaran Sejarah", dalam Heather Sutherland, dkk, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, h. 211.

dibangku kelas IV SD Mangkura. Ia dibunuh oleh warga etnis Tionghoa bernama Benny Karre (23 tahun) pada Senin malam, tepatnya pukul 19.35, 15 September 1997. Tak berselang lama, Benny pun diamuk oleh massa hingga nyawanya tak tertolong. Tak berhenti di situ, massa yang penuh kebencian menghancurkan rumah Benny dan rumah-rumah warga etnis Tionghoa lainnya di sekitar rumah Benny.²⁸

Di distrik Pecinan atau kawasan pemukiman orang-orang Tionghoa, seperti di Jalan Sulawesi, Nusantara, Timor, Sumba, Bonerate, Bali, Lembah, Irian, dan sekitarnya terlihat bagaikan kota mati. Orang-orang Tionghoa meninggalkan Kota Makassar mengungsi ke sanak keluarga yang jauh untuk menyelamatkan diri. Effendy mendeskripsikan sebuah gambar yang dipotret seorang fotografer di mana dalam gambar tersebut terlihat seorang wanita tua dipapah oleh dua petugas yang ditangannya menjinjing bungkusan. Jidatnya ditemplei obat koyo menandakan ia sedang sakit.²⁹

Menurut Chritiany Juditha, hubungan etnis Tionghoa dan etnis Bugis-Makassar sebenarnya terjalin dengan harmonis. Namun, ketika timbul suatu masalah, baik masalah itu bersumber dari warga etnis Tionghoa atau bukan, warga etnis Tionghoa selalu menjadi sasaran. Kecemburuan sosial dan hubungan harmonis yang semu menjadi masalah yang terpendam antarkedua etnis tersebut.³⁰

Pasca Orde Baru, hubungan kedua etnis tersebut perlahan mulai membaik, meskipun realitanya sepenuhnya tidak. Namun, setidaknya sudah ada perbaikan ketika Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengeluarkan kebijakan pengakuan etnis Tionghoa sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lainnya. Gus Dur sebenarnya sejak dulu telah komitmen memperjuangkan hak-hak etnis Tionghoa ketika ia menjabat sebagai Ketua Umum PBNU 1984. Kebijakan Gus Dur tersebut lalu dilanjutkan oleh Presiden Megawati dengan menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur Nasional melalui Kepres No. 19 tahun 2002. Sejak itulah, warga etnis Tionghoa di Indonesia bebas merayakan Hari Raya Imlek.

Meski demikian, secara politik kewarganegaraan, etnis Tionghoa mulai diakui oleh negara. Namun, fakta sosial tidak bisa dipungkiri bahwa konflik etnis masih tetap membayang-bayangi kehidupan sosial masyarakat Kota Makassar. Misalnya, di era reformasi, seperti yang dicatat oleh Juditha³¹, di mana pada 10 Mei 2006, tiga bulan sebelum ditandatanganinya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, terjadi

²⁸ Kinanthi Nisful Laily, "Dinamika Kehidupan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar pada Masa Orde Baru 1966-1998", h. 36.

²⁹ Muslim A.R. Effendy, "Tionghoa-Makassar di Tengah Pusaran Sejarah", dalam Heather Sutherland, dkk, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, h. 211.

³⁰ Christiany Juditha, "Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar", *Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 1 (2015): h. 94.

³¹ Christiany Juditha, "Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar", *Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 1 (2015): h. 93.

suatu peristiwa seorang pembantu dari etnis Bugis dibunuh oleh warga etnis Tionghoa. Setahun kemudian, tepatnya 1 Juli 2007 terjadi pengroyokan seorang dosen Universitas Negeri Makassar yang pelakunya berasal dari tiga orang warga etnis Tionghoa. Dua peristiwa tersebut memicu kemarahan masyarakat. Massa mahasiswa juga melakukan *sweeping* dan memprovokasi masyarakat untuk melakukan pengganggangan etnis Tionghoa. Hal serupa kembali terjadi pada Mei 2011 meskipun tidak separah kerusuhan pada masa-masa sebelumnya, peristiwa ini dimantik oleh kasus penganiayaan yang berakhir dengan kematian seorang pekerja rumah tangga asal Sinjai yang dilakukan oleh seorang majikan beretnis Tionghoa.

Meskipun fakta sejarah mencatat bahwa kota Makassar memiliki sejarah kelam perihal konflik etnis, namun semakin ke sini perubahan interaksi sosial semakin terlihat ke arah yang lebih baik. Ada banyak pihak terlibat dalam menciptakan kehidupan harmonis di kota Makassar. Salah satu bentuk kegiatannya adalah dialog agama dan etnis, baik dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil (*civil Society*).

A. Penutup

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Etnis Tionghoa sejak dulu sudah ada di Makassar. Awal mula kedatangan etnis Tionghoa untuk berdagang. Akhirnya, hubungan keduanya terjalin dengan baik. Hubungan yang baik inilah salah satu faktor orang-orang Tionghoa senang tinggal di Makassar dan menetap. Gelombang imigrasi dari etnis Tionghoa pun mulai meningkat sehingga jumlah etnis Tionghoa yang menetap di Makassar pada abad ke-18 sebanyak 310 jiwa dan mengalami peningkatan pada abad awal abad ke-20 sebanyak 15.000 jiwa. Interaksi sosial-kebudayaan antarkedua etnis tersebut tidak terelakkan sehingga terbangun akulturasi dan asimiliasi dalam aspek sosial-kebudayaan. Misalnya, muncul sejumlah sapaan khas seperti *baba* hingga budaya etos usaha ekonomi di dalam kultur etnis Bugis-Makassar adalah hasil akulturasi dan asimiliasi.
2. Jalinan harmonis antara etnis Tionghoa dan Bugis-Makassar yang terbangun sejak dulu, mulai retak akibat konflik politik dan ideologi pada tahun 1965. Penguasa Orde Baru menuduh etnis Tionghoa terlibat dibalik aksi pemberontakan G30S 1965. Tuduhan tersebut meskipun tidak beralaskan fakta, namun stigma negatif bahwa etnis Tionghoa terlibat dalam gerakan tersebut terus diproduksi, baik ditingkat politik dengan keluarnya sejumlah kebijakan-kebijakan negara yang mendikriminasikan etnis Tionghoa maupun di aras kultural-masyarakat. Stigma itu bagaikan “bom waktu” yang kapan saja bisa meladak. Setidaknya dari tahun 1965-1997 tercatat ada tiga konflik etnis yang melibatkan warga etnis Tionghoa di Makassar sebagai korban kekerasan. Misalnya, pada tahun 1965, konflik etnis terjadi karena dipicu oleh konflik politik dan ideologi. Sedangkan konflik etnis tahun 1980 disebabkan oleh persoalan individu. Begitu pula

pada tahun 1997 konflik etnis muncul karena dipicu oleh pembunuhan yang pelakunya seorang warga beretnis Tionghoa. Bahkan di era pasca reformasi, meskipun warga etnis Tionghoa sudah diakui oleh negara sebagai warga negara yang setara dengan warga lainnya, tetapi konflik rasial masih biasa terjadi dan korbannya lagi-lagi adalah warga etnis Tionghoa. Hanya saja, skala konflik pada pasca reformasi tidak signifikan pada masa-masa sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Effendy, Muslim A.R., "Tionghoa-Makassar di Tengah Pusaran Sejarah", dalam Heather Sutherland, dkk, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, Cet. I; Yogyakarta: Ombak, 2004.

Horowitz, Donald L., *Ethnic Groups in Conflict*, California: University of California Press, 1985.

Inpres RI No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

Juditha, Christiany, "Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar" *Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 1 (2015): h. 87-104.

Laily, Kinanthi Nisful, "Dinamika Kehidupan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar pada Masa Orde Baru 1966-1998", *Skripsi*. Jember: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2016.

Maknun, Tadjuddin, "Asimilasi Sistem Sapaan Multikultural Cina, Melayu, dan Makassar" disampaikan pada Seminar Bersama Universitas Hasanuddin dan Universitas Kebangsaan Malaysia di Makassar 2011.

Pelras, Christian, *The Bugis*, Terj. Abdul Rahman Abu, dkk, *Manusia Bugis*, Cet. I; Jakarta: Nalar bekerjasama Forum Jakarta-Paris, 2006.

Pradadimara, Dias, "Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah Makassar" dalam Freek Colombijn, dkk, *Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*, Cet. I; Yogyakarta: Ombak, 2005), h. 256.

Prayudi, "Akar Masalah Penyebab Konflik Etnis dan Alternatif Penyelesaiannya", *Jurnal Ketahanan Nasional* IX, no. 3 (2004): h. 39-59.

Rais, Muhammad, "Merengkuh Umat Khonghucu di Aras Lokal: Potret Pelayanan Kementerian Agama terhadap Penganut Agama Khonghucu di Kota Makassar" dalam Shadiq Kawu, dkk, *Spirit Khonghucu: Modal Sosial dalam Merenda Kebangsaan*, Cet. I; Jakarta Selatan: Orbit Publishing, 2011.

Sulindo, Koran, "Peristiwa G30S 1965 dan Isu Rasial Tionghoa"
<https://koransulindo.com/peristiwa-g30s-1965-dan-isu-rasial-tionghoa> diakses
Selasa 16 Mei 2023.

Surat Edaran Preskab Ampera No. SE-06/Pres.Kab/6/1967 tentang Masalah Cina.

Susan, Novri, *Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis*, Cet. IV; Jakarta Timur: Kencana, 2019.

Sutherland, Heatherd, "Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Makassar: Perdagangan dan Kota di Abad ke-18" dalam Heather Sutherland, dkk, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, (Cet. I; Yogyakarta: Ombak, 2004.

-----, "Teripang dan Perahu Wangkang: Perdagangan Makassar dengan Cina pada Abad ke-18, dalam Roger Tol ed., *Authority and Enterprise among the Peoples of South Sulawesi*, Terj. Tim Penerjemah Innawa, *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*, Cet. I; Makassar: Innawa kerjasama KITLV-Jakarta, 2009.

Taufik, *Kamp Pengasingan Moncongloe*, Cet. I; Depok: Desantara, 2009.

Tarupay, Heri Kusuma, "Boycot Jepang: Nasionalisme Cina Perantauan di Makassar 1915-1937" *Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences* 12, no. 1 (2017): h. 1-12.

www.oocities.org, "Bila Sara Kebakaran Jenggot, Jago Merah pun Merenggut Makassar"
<http://www.oocities.org/apii-berlin/ujung.html> diakses 17 Mei 2023.